

SUMBAHAN DARI DOSEN P. S. I.
NAMA : Muzairi
NIP/NIM :
TANGGAL : 12 JUL 2010

CULTURE STUDIES POSTSTRUKTURALIS POSTKOLONIALIS :

RELASI KEKUASAAN DAN HEGEMONI DALAM KAJIAN

ORIENTALISME EDWARD W. SAID

Oleh: Muzairi

A. PENDAHULUAN

Dikaitkan dengan perkembangan studi humaniora, perkembangan pesat kajian budaya (*culture studies*) khususnya, diantara teori-teori poststrukturalisme, teori postkolonialisme dianggap sebagai salah satu teori yang relevan sekaligus minat. Alasannya teori tersebut erat kaitan dengan kolonialisme, imperialisme, orientalisme, dan berbagai isu yang berkaitan dengan *kekuasaan*. Bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan kaitannya dengan nasionalisme dan Islam yang dianggap relevan. Sebagai varian postrukturalisme, postkolonialisme diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dalam rangka menentang imperialisme.

Ada kaitan erat antara kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme di satu pihak, dengan orientalisme di pihak yang lain. Secara keseluruhan paham tersebut merupakan alat bagi bangsa-bangsa barat untuk menguasai bangsa Timur. Perbedaannya, ketiga komponen pertama murni bersifat praktis, lebih nyata dan langsung, sedangkan komponen terakhir bersifat teoretis, dengan sendirinya tidak nyata dan tidak langsung. Popularitas teori orientalisme mulai sejak terbitnya buku yang ditulis oleh Edwards Said (1978) berjudul *Orientalism* yang kemudian dijelaskan dalam bentuk tanya jawab dalam bukunya yang berjudul *Power and Culture* (2001). Dalam buku pertama Said (1994: 1, 15, 125) mendefinisikan orientalisme sebagai suatu cara, metode, bahkan sebagai ilmu, dengan sendirinya dilakukan secara sistematis dan diciptakan secara disengaja, untuk memahami dunia Timur atas dasar pemahaman Barat.

Orientalisme mengandung kesadaran geopolitis, Barat dan Timur, diterapkan baik kedalam naskah estetik seperti karya seni maupun ilmu pengetahuan, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah filologi, dan sebagainya. Seperti penulisan sejarah, orientalisme ditulis dengan cara yang khas, dengan mekanisme pemplotan, sehingga bias-bias ideologis dapat dipertahankan.

Pada awalnya orientalisme dianggap semata-mata sebagai suatu model penelitian murni untuk mengetahui kondisi, seluk-beluk, dan hakikat dunia Timur secara keseluruhan. Oleh karena itulah, semua dianggap berbagai penelitian yang berkaitan dengan dunia Timur, yaitu khazanah oriental itu sendiri, merupakan analisis objektif, dalam pengertian tidak memasukkan tendensi-tendensi tertentu sebagaimana dimaksudkan oleh penulisnya. Sejarahlah, sebagaimana sejarah postmodern, melalui kompetensi, paradigma, dan metodologinya berhasil mengungkap bahwa narasi tidak bergerak secara linier.

Teori postkolonialisme, sebagai salah satu varian poststrukturalisme, melalui para pelopornya seperti Foucault, White, Derrida, Kristeva, Spivak, dan sebagainya, pertama kali membongkar maksud-maksud tersembunyi tersebut sehingga sering diduga bahwa orientalisme tidak berbeda dengan kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Bahkan orientalisme dianggap lebih berbahaya sebab yang dikuasai adalah teks, padahal pikiran, tingkah laku, dan segala aktivitas manusia ada di dalam sekaligus merupakan teks.

Dengan kalimat lain, yang dimaksudkan dengan teks di sini adalah keseluruhan hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. Oleh karena itu pulalah, secara hiperbolis Said mengatakan bahwa orientalisme merupakan teks-teks predatori yang secara perlahan-lahan menghisap kekuatan bangsa Timur.

Orientalisme, menurut Leela Gandhi merupakan katalisator kolonialisme dan postkolonialisme, sebagai tahap awal postkolonialisme. Orientalisme lebih menaruh perhatian pada makna tekstual diskursif, aktivitas yang tidak saing berhubungan sebab kapan pun dapat berbicara untuk mengklaim Timur sesuai dengan rasionalitas Barat. Oleh karena itu, Spivak menyebutkan buku Said sebagai sumber sekaligus pemicu utama timbulnya teori postkolonialisme. Gagasan orientalisme dikembangkan oleh Edward Said, bertumpu pada perspektif Foucaultian, tetapi dibungkus oleh teori hegemoni Gramscian. Masalah pokok yang dikemukakan adalah ketidakseimbangan masyarakat Barat dalam melihat masyarakat Timur.

Akhirnya tulisan ini ingin mengkaji secara garis besar hubungan relasi kekuasaan dan hegemoni dalam kajian orientalisme oleh Edward W. Said.

B. EDWARD W. SAID

Salah satu diskusi penting tentang isu etnisitas (khususnya yang berkaitan dengan dunia Timur) muncul dari seorang pemikir poststrukturalis poskolonialis, Edward W. Said, di dalam bukunya *Orientalism*. Said menggambarkan, bagaimana orang Eropa dan Amerika melihat kebudayaan Timur dan Arab tidak sebagaimana adanya (secara objektif), akan tetapi memandangnya melalui kacamata mereka sendiri (secara subjektif).

Dengan menggunakan teori *discourse* Michel Foucault, Said mengangkat pertanyaan-pertanyaan tentang relasi kekuasaan yang melatari representasi Timur dalam wacana orientalisme. Relasi kekuasaan – khususnya dalam wacana orientalisme – menurut Said, melatari berbagai bentuk representasi, antara lain arsitektur, seni, film, dan sebagainya. Orientalisme, menurut Said, adalah sebuah wacana yang sama sekali tidak berkaitan dengan dengan satu kekuasaan politik secara demikian saja, akan tetapi dihasilkan dalam satu ajang pertukaran berbagai jenis kekuasaan.

Said membedakan empat jenis hubungan kekuasaan yang hidup di dalam wacana orientalisme, yaitu: 1) kekuasaan politik (pembentukan kolonialisme dan imperialisme); 2) kekuasaan intelektual (mendidik Timur melalui sains, linguistik, manajemen modern); 3) kekuasaan budaya (kanonisasi selera, teks dan nilai-nilai, misalnya Timur mempunyai kategori estetika kolonial, yang secara mudah dapat ditemukan di India, Karibia dan negara-negara bekas jajahan lainnya); dan 4) kekuasaan moral (apa yang baik dilakukan atau tidak baik dilakukan oleh Timur).

Argumen Said adalah bahwa wacana orientalisme dihidupkan oleh Barat dengan cara yang sangat vulgar dan memperbudak. Wacana orientalisme, menurut Said, beroperasi berdasarkan model ideologi yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni – suatu pandangan bahwa gagasan tertentu lebih berpengaruh dari gagasan-gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan dari kebudayaan-kebudayaan lain. Orientalisme, bagi Said, lebih sebagai legitimasi gagasan tentang superioritas Barat terhadap inferioritas Timur.

Di sini, Timur adalah sebuah metafora, yang berfungsi di dalam wacana pengetahuan Barat sebagai semacam teater, sebuah panggung tempat pertunjukkan tentang kebudayaan, yang dimainkan secara berulang-ulang. Masyarakat Barat bertindak sebagai penonton, yang melihat Timur melalui kaca mata yang telah ditentukan. Dalam hal ini, orientalisme bukanlah sebuah upaya visualisasi atau representasi kebenaran tentang kebudayaan-kebudayaan Timur. Sebaliknya, ia merupakan sebuah upaya untuk menilai atau bahkan mengadili kebudayaan Timur dari sudut pandang Barat.

Bagaimana penilaian dan pengadilan ini berlangsung? Bagi Barat, Timur tampak sebagai sebuah tempat eksotik nun jauh di sana, yang misterius, gaib, rapuh, dan statis; dengan tanda-tanda kebudayaannya yang telah terkubur. Dengan perkataan lain, Timur dipahami secara keliru, disebabkan pandangan Barat tentang kemajuan dan ketiadaannya di Timur. Ini berarti, bahwa Barat memberikan nilai pada Timur, dalam hubungannya dengan konsep kemajuan. Timur dinilai sebagai inferior, karena ia tidak tampak cukup progresif atau maju seperti Barat (meskipun pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada Barat: apakah Barat benar-benar maju? Ini adalah sebuah pertanyaan lain yang belum dijawab Barat sendiri secara memadai).

Menurut Said, untuk memproduksi Timur sebagai sebuah teater, Barat menggunakan gagasan, doktrin atau *trend* unggul yang berasal dari wacana Barat, sehingga dari sini muncul konsep Timur ala psikoanalisis Freud, ala linguistik Saussure, dan sebagainya. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat dikatakan sebagai orientalisme tanpa dosa – yaitu, orientalisme yang tanpa bias politik, ideologis, sosiologis, antropologis atau kultural.

Setiap bias yang timbul dalam wacana orientalisme didorong oleh semangat oposisi biner (*binary opposition*) dan Narasi Besar yang hidup sebagai warisan filsafat pencerahan Barat – bahwa, di satu pihak, sesuatu yang dinamakan kebenaran, kekuasaan atau makna haruslah berlandaskan pada *logos*, yaitu kebenaran di atas kebenaran; sementara, di pihak lain, bentuk-bentuk eksistensi yang inferior dan rendah, fungsinya tak lebih dari alibi bagi eksistensi yang superior. Orientalisme, etnosentrisme dan rasisme berlangsung mengikuti

model oposisi duaan ini, misalnya: superior/inferior, kulit putih/kulit hitam, maju/terbelakang, Aria/Scmit, maskulin/feminim, aktif/pasif, rasional/irasional, Barat/Timur – dalam oposisi duaan ini tidak terbatas! Asumsi yang berkembang dalam pemikiran-pemikiran Barat adalah mengunggulkan yang pertama dan melecehkan yang kedua dalam urutan oposisi duaan tersebut, yang dianggap tidak lebih dari sebuah eksistensi yang keliru, yang ada di luar kebenaran.

Dalam hal ini, menurut Said, Timur telah ditekstualisasi oleh Barat – ia diperbincangkan, ditulis, diproduksi dan dipertunjukkan dalam konteks wacana Barat – di atas panggung kebudayaan Barat. Keaslian, keeksotisan, dan keagungannya telah dibuat samar-samar dalam wacana Barat. Di tangan Barat, atau melalui kacamata Barat, Timur diproduksi sebagai satu bentuk hibrida. Tak ada lagi Timur yang murni dan orisinal. Dalam hal ini, Timur dipergunakan sebagai ukuran untuk membuktikan batas-batas kemampuan Barat dalam merepresentasikan kebudayaan-kebudayaan lain.

C. RELASI KEKUASAAN

Pemikiran Foucault sangat dipengaruhi Nietzsche, namun dia tidak sepenuhnya sebagai pengikut Nietzsche, sebab baginya, Nietzsche yang diikutinya adalah seseorang yang orisinal, begitupun dengan dia yang harus orisinal dengan pandangan pribadinya. Bahkan dia tidak jarang tidak sependapat dengan filsuf pujaannya itu. Hal ini terdapat dalam teori Genealogi Foucault. Di sini, bahasa bagi Foucault tidak bisa dikurung dalam “apa yang ditulis” dan “apa yang menjadi tafsirnya”, keduanya saling terjalin tanpa pemisahan. Hal ini adalah salah satu dari pemikirannya tentang subjek dan objek, bahwa bahasa yang ditulis dan menjadi tafsirnya tidak bisa dipisahkan dalam subjek dan objek. Keduanya terserak tanpa teratur, tanpa terstruktur (Michel Foucault, tt, 336-339) secara baku.

Tentang subjek dan objek, filsuf tahun 60-an adalah filsuf yang merayakan kematian subjek (pengada awal) yang disejajarkan dengan Tuhan. Lalu setelah itu, jika Tuhan mati, maka manusia yang mengikuti Tuhan juga mati. Sebab manusia yang mengikuti Tuhan itu tidak punya kuasa atas dirinya

tanpa Tuhan yang memberi makna padanya. Maka dari sini filsafat yang selama ini berkuat pada humanisme sudah tamat. Maka manusia baru pun bisa dibangkitkan lagi. Namun Foucault sendiri bersedih karena kehilangan makna seiring hilangnya subjek (Tuhan) tadi.

Subjek menurut Foucault subjek yang sejajar dengan individu hanya akan bisa ditelaah melalui kekuasaan. Lalu kekuasaan sendiri baginya bukanlah nominalis, tidak pejal dan tidak bisa dipegang, dia adalah peng-kata-an dari multiplisitas dan jalinan kekuatan-kekuatan. Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bahkan oleh kaum dominan sekali pun, tidak bisa dipengaruhi oleh kepenuhan hukum atau pun kebenaran, dia tidak tunduk pada teori politik normal, tidak bisa direduksi oleh representasi (hukum). Kemudian hubungan antara subjek dan kekuasaan adalah bukan pelaku dan produk. Sebab bukan subjek (secara substantif) yang menciptakan kekuasaan, namun kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek, dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan (founding subject). Demikian manusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia mempengaruhi kekuasaan. Bahkan subjek pada akhirnya menihilkan kebebasan dan subjektivitas. Dengan begitu, kebebasan dan subjektivitas baru akan ditawarkan olehnya. Kebebasan semacam apa itu, kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak pada subjek yang dihasilkannya (Michel Foucault, tt, 336-339).

Pendefinisian kekuasaan dan kehendak itu kemudian dipakai oleh, salah satunya oleh pengaturan kehidupan seksualitas di Eropa pada masa Ratu Victoria I (1819-1901). Karena Ratu sangat dominan dalam mengendalikan rakyatnya, maka dia juga mengatur hal-hal kecil dari rakyatnya. Kehidupan seksualitas yang bebas harus dipisahkan dari kesopanan di Eropa. Disini tampak bahwa kekuasaan yang diartikan oleh Foucault yang berhubungan dengan kehendak itu harus dibatasi oleh sistem pemerintahan. Pemikiran yang bersifat mekanisme ini dinyatakan olehnya sebagai sesuatu yang efektif, bukan mistis seperti yang ditawarkan fenomenologi. Menurut dia, kekurangan dari fenomenologi bisa dijawab oleh sains (ilmu tentang manusia, misalnya psikologi). Namun hal ini juga akan disadari olehnya sebagai penyesatan belaka, sama dengan penyelidikan

filosofis. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pada zaman pencerahan pasca Descartes pada abad 17, yaitu ketika manusia menyukai dialog dan kegilaan. Kegilaan yang dia maksud adalah bidang medis, hal ini cocok dengan pengalamannya bekerja di Rumah Sakit Jiwa.

D. HEGEMONI

Sistem kekuasaan yang sudah jelas dalam marxisme akan berbeda dalam perbincangan mengenai politik media atau politisasi media tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep dasar ideologi yang berkaitan dengan media, terutama konsep hegemoni, meskipun dalam kenyataannya Karl Marx memandang ideologi sebagai kesadaran palsu dan merupakan sistem yang menunjang kepentingan-kepentingan tertentu (Frank Magnis-Suseno: 1995, 228).

Hegemoni dalam praktik media menjadi hal yang strategis. Dalam tradisi marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan diantara klas-klas sosial khususnya yang berkuasa. Tampak di sini, bahwa baik dalam tradisi marxisme maupun tradisi sebelumnya istilah hegemoni digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan politik.

Hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci (1891-1937) yang bersumber dari buku *Selection from Prison Notebooks*. Buku ini adalah catatan Gramsci selama dipenjara antara tahun 1929-1935. Teori hegemoni Antonio Gramsci menganalisa berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat. Lewat perspektif hegemoni, akan terlihat bahwa penulisan, kajian suatu masyarakat, dan media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan kelompok penguasa. Alat kontrol tersebut memainkan peranan penting dalam menciptakan lembaga dan sistem yang melestarikan ideologi kelas dominan (<http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2227008-teori-hegemoni-antonio-gramsci>). Hegemoni berasal dari bahasa Yunani, *egemonia* yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas, pengertian hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa.

Gramsci membedakan antara konsep “dominasi” dan “hegemoni”, dimana dominasi merupakan model penguasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik. Sedangkan hegemoni adalah model penguasaan yang lebih halus, yaitu secara ideologis. Teori hegemoni Gramsci memberikan sumbangan bagi pemikiran Marxian yang berkembang sebelumnya, yaitu: pertama, Gramsci menerapkan konsep tersebut pada setiap relasi sosial, bukan hanya dalam konteks hubungan buruh dan majikan. Kedua, hegemoni adalah pengaruh kultural, bukan kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi sebagaimana dipahami generasi Marxis sebelumnya. Selain itu, perbedaan hegemoni Gramsci dengan aliran Marxian sebelumnya adalah, gagasannya mulai terpisah dari determinisme dan ekonomisme Marxis. Gramsci lebih menekankan pada suprastruktur gagasan manusia daripada substruktur ekonomi masyarakat (Neil Mc Innes: 1972, 174-176).

Hegemoni melakukan kendali melalui penciptaan kesadaran umum masyarakat oleh kelas yang berkuasa. Hegemoni menggunakan kombinasi “paksaan” dengan “kerelaan”. Artinya hegemoni bukan hanya memaksa subyek yang dikuasai, namun juga menciptakan kondisi dimana subjek merelakan dirinya untuk dikuasai. Dan, kondisi demikian diciptakan melalui ideologi, sebagai medium penyampaian gagasan yang dipercayai. Pada praktiknya, hegemoni dicapai bukan melalui induktrinasi langsung, tetapi meyakini lewat tatanan nilai dan sistem makna yang dihayati masyarakat. Jadi, ideologi bukan cuma cerminan atas kondisi material sebagaimana pandangan kaum Marxis. Namun konsepsi kehidupan yang tampak dalam semua aspek masyarakat.

Antonio Gramsci – seorang pemikir Italia – mengembangkan pengertian hegemoni secara lebih luas, sehingga ia tidak hanya digunakan untuk menjelaskan relasi antar kelas-kelas politing (*ruling class/ruled class*), akan tetapi relasi-relasi sosial yang lebih luas, termasuk relasi komunikasi dan media. Dalam pandangan Gramsci, konsep hegemoni tidak hanya menjelaskan dominasi politik lewat kekuatan (*force*), akan tetapi yang lebih penting, lewat kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*). Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan diperjuangkan, di samping lewat

kekuatan senjata, juga lewat penerimaan publik (*public consent*), yaitu diterimanya ide kelas berkuasa oleh masyarakat luas, yang diekspresikan melalui apa yang disebut sebagai mekanisme opini publik (*public opinion*) – khususnya lewat media massa (koran, televisi dan sebagainya) (Neil Mc Innes: 1972, 376-377).

Oleh sebab itu, pembentukan opini publik merupakan hal yang sangat sentral dalam prinsip hegemoni, yang untuk itu diperlukan mediasi berupa ruang publik (*public sphere*). Dalam kaitannya dengan penciptaan ruang publik ini, Gramsci menganggap penting adanya institusi-institusi, yang berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan hegemoni ideologi. Gramsci menyebut institusi dan strukturnya sebagai alat hegemoni (*hegemonic apparatuses*), seperti sekolah, masjid, gereja, media massa, bahkan arsitektur atau nama jalan (Yasraf Amir Piliang: 2001, 136). Sesuai dengan namanya, alat hegemoni ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan dan mempertahankan ide-ide atau ideologi hegemonik.

E. ORIENTALISME

Dengan meminjam konsep *discourse* dan kekuasaan menurut proposisi Foucaultian dan Nietzschean (Said, 1994, 4; 2003, 244-245), orientalisme adalah gaya Barat untuk menguasai Timur. Sejarawan, antropolog, sosiolog, sastrawan, dan ilmuwan Barat melalui kekuatan wacana mengkonstruksi Timur sebagai inferior. Retorika kekuatan inilah yang harus didekonstruksi (Norris, 1983, 87—89) sebab wacana bukanlah entitas dengan dunianya yang khas, dunia Barat, wacana bukan semesta tekstual Alexanderian yang tidak berbaiktan dengan aktualitas. Sama dengan karya sastra yang dilepaskan dari kompetensi autorial pengarangnya, wacana kultural pun harus dipisahkan dari kesemestaan asalnya, dimasukkan ke dalam arena pertempuran interpretasi.

Wacana orientalisme dapat disebutkan sebagai suatu disiplin yang sistematis yakni budaya Barat maupun mengatur, bahkan menciptakan Timur sebagai politis, sosiologis, militer, ideologis, saintifik, dan imajinatif, khususnya selama masa pasca-Pencerahan. Secara sepintas lalu hubungan antara Barat

dengan Timur tampak netral. Tetapi, apabila diperhatikan secara seksama Barat dan Timur adalah ekspresi dan relasi kekuasaan tertentu. Benar, orientalisme merupakan disiplin untuk memahami Timur, tetapi perlu disadari bahwa mengerti segala sesuatu berarti menguasai. Said (King, 2001, 162-163) membedakan tiga aspek dalam kaitannya dengan orientalisme, yaitu: a) sebagai pemikiran, baik yang bersifat ontologis maupun epistemologis, sehingga timbul perbedaan antara dunia Barat dengan Timur, b) sebagai orientalis, sebagai penulis, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia timur, seperti: para antropolog, filolog, sasstrawan, sejarawan, dan para kritikus lain, dan c) sebagai institusi, sehingga berhak membuat pernyataan dan pandangan-pandangan tertentu mengenai Timur. Di samping itu Said (1994, 266-267) juga membedakan orientalisme menjadi dua macam, yaitu: a) orientalisme laten (*latent*), dan b) orientalisme nyata (*manifest*). Orientalisme jenis pertama bersifat gagasan, kompleks, sebagai ide tersembunyi yang terkandung dalam pemikiran masyarakat Barat yang secara terus menerus mengkonstruksi ideologi mengenai marginalitas Timur. Orientalisme jenis kedua sudah berupa tulisan dalam berbagai bentuknya, baik fiksi maupun non fiksi, baik lisan maupun tulisan.

Dikaitkan dengan konsep hegemoni Gramscian, orientalisme memberikan ketahanan dan kekuatan, semacam hegemoni yang diperoleh secara cuma-cuma melalui bangsa yang dikuasainya. Dengan orientalisme dunia Timur sejak dulu hingga sekarang bukan merupakan objek pikiran yang bebas. Budaya Eropa memperoleh kekuatan, identitas dengan menyatakan superioritas dirinya di mata dunia Timur. Dengan singkat, orientalisme adalah gaya berpikir yang didasarkan atas perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara Timur (*the Orient*) dan Barat (*the Occident*), baik oleh penyair, novelis, filsuf, politikus, dan ekonom, maupun administrator dan misionaris. Timur bukan kenyataan yang asli, melainkan dibuat oleh manusia sebab manusia membuat sejarahnya sendiri, sehingga Barat dan Timur seolah-olah merupakan ciptaan manusia. Sebagai kenyataan politik dan budaya, pada gilirannya orientalisme bukan semata-mata pokok bahasan suatu ilmu pengetahuan, tetapi penyebaran kesadaran geopolitis, kesadaran yang secara terus menerus dibentuk kembali, sesuai dengan konstruksi

sejarah. Dengan mengintroduksi Edward Said, menurut Barker (2000: 210-211) orientalisme bukan semata-mata masalah ras. Artinya, ras tidak terbatas sebagai psikologi atau patologi individu, melainkan representasi budaya, wacana subjektif masyarakat Barat. *Orient* dengan demikian dianggap sebagai entitas geografis, konstruksi diskursif yang berakar dalam sejarah, tradisi, dan dengan sendirinya kosakata dengan seperangkat diskursus dengan tujuan-tujuan tertentu, dalam hubungan ini hegemoni Barat untuk mengkonstruksi masyarakat Timur agar semakin jauh ke Timur. Oleh karena itulah, menurut Said, seperti disinggung diatas, orientalisme bertolak atas dasar gagasan Foucaultian dan dibingkai oleh hegemoni Gramscian.

Dalam orientalisme masyarakat yang terjajah digambarkan sebagai inferior, irasional, dapat dikontrol, dan dapat dimanipulasi oleh pihak yang dominan. Sikap seolah-olah memajukan kehidupan bangsa-bangsa yang dianggap masih terbelakang sehingga penduduk pribumi menjadi lebih beradab, adalah slogan terpenting yang selalu dikaitkan dengan ciri khas orientalisme, bahkan kolonialisme itu sendiri dipandang sebagai tidak sepenuhnya memiliki ciri-ciri negatif sebab pemberadaban sesuai dengan misi Abad Pencerahan adalah hak memerintah kepada mereka yang rasional, yang berhasil untuk menguasai dunia.

Edward Said (Sardar dan Loon, 2001, 110) bukan orang pertama yang berbicara mengenai orientalisme. Sebelumnya, dengan konsep yang hampir sama sudah dikemukakan oleh Abdul Latif Tibawi (Suriah), Hichem Djait (Tunisia), dan Syed Hussain Alatas (Malaysia). Meskipun demikian, popularitas Said lebih menonjol di kalangan dunia internasional sebab Said tinggal di New York, disamping itu Said juga menyediakan konsep-konsepnya secara sistematis. Pada dasarnya mereka memandang orientalisme sebagai kekuasaan kolonial dalam mengkonstruksi citra tentang bangsa Timur yang terjadi sejak abad ke-16 hingga abad ke-20. Orientalisme melahirkan aliran kritis yang disebut postkolonial, wacana yang terbentuk, muncul ke permukaan sebagai pemahaman baru sesudah imperium kolonial.

F. GEOGRAFI IMAJINATIF

“Geografi imajinatif” kemudian menjadi salah satu praktek orientalis untuk membedakan identitas Timur dengan Barat, dalam batas-batas teritorialnya yang tegas (meski sedikit imajiner), tanpa peduli apakah “mereka” (Timur) mengakui identitas “kita” (Barat) atau tidak. Oleh Barat, Timur dianggap sebagai “kawasan nun jauh di sana, yang eksotik, yang feminim, yang penuh dengan romansa, kenangan, imaji-imaji, dan janji-janji”.

Timur adalah sebuah metafora, yang dalam wacana Barat, hanyalah berfungsi layaknya panggung dramaturgi. Di atas panggung ini, Timur diperankan sebagai dramawan, dengan para orientalis sebagai sutradaranya. Timur disuguhkan sedemikian rupa kepada para penonton, yang terdiri tidak hanya para pembaca Barat, tetapi juga mereka yang membenarkan skenario sang sutradara. Di kedalaman panggung ini, terdapat repertoar-repertoar budaya yang menakjubkan: Sphinx, Troya, Piramida, Muhammad, dan lain-lain. Sedangkan *setting*-nya, dalam banyak hal, hanyalah nama-nama, yang setengah khayal, setengah nyata, setengah fiksi, setengah fakta. Bagi Barat, identitas Timur “benar-benar tak punya tanda, kecuali warna sepia. Cokelat tua. Setua zaman kita”.

Semua itu, tentu saja, bermula dari persoalan identitas, dan bagi Said, identitas itu adalah sesuatu yang tak pernah utuh. Dalam *Freud and the Non-European* (2003), Said pernah berujar bahwa identitas seorang individu ataupun suatu bangsa tidak pernah bisa dimampatkan, digeneralisasikan, atau disimplikasikan menjadi “satu-satunya identitas”. Sayangnya, Barat seolah-olah hendak membentuk identitas Timur, melangkahi sejarah Timur, dan – meminjam istilah Said dalam prolognya – “menjadikan Timur layaknya papan tulis, yang jejak-jejaknya bisa dihapus, agar ‘kita’ bisa tinggal disana dan memaksakan nilai-nilai ‘kita’ untuk diikuti oleh ‘mereka’, orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Karena konstruksi identitas hampir selalu melibatkan konstruksi antitesis dan *others* yang terus menjadi objek interpretasi, maka sudah bisa ditebak, sebagai suatu konstruk identitas yang – menurut Said – nyaris semi-mitos, Timur dianggap sebagai “yang lain”, “*others*”, dan “*liyan*” bagi Barat. Dalam konstruksi

ini, terjadi persaingan penafsiran, yang ujung-ujungnya – sebagaimana implikasi orientalisme itu sendiri – hanyalah melegitimasi karakteristik-karakteristik “mereka” yang berbeda dengan “kita”, kebudayaan “kita” yang lebih superior daripada kebudayaan “mereka”, begitu seterusnya.

Orientalisme beroperasi dalam ruang-ruang identitas semacam ini. Orientalisme telah berhasil menciptakan batas-batas yang tegas antara “mereka” (Timur) dan “kita” (Barat), dan batas-batas ini benar-benar bukanlah fiksi atau sekedar imajinasi dalam pikiran. Seperti kata Said, suatu kekonyolan besar jika kita hanya menganggap orientalisme sebagai imajinasi, kebohongan, mitos, atau sekedar fantasi orang-orang Eropa. Orientalisme lebih bermakna sebagai tanda superioritas Atlantik-Eropa terhadap dunia Timur, yang didalamnya terdapat relasi kekuasaan, dominasi, dan hegemoni yang kompleks.

Di Barat, institusi-institusi kajian Timur Tengah mulai dibangun, kebijakan-kebijakan mulai ditetapkan bagi mereka yang mengaku sebagai “Timur”, stereotip-stereotip tentang Timur mulai disebarluaskan tanpa henti, dan terakhir – yang paling mengerikan – invasi-invasi sudah mulai digalakkan kembali ke wilayah-wilayah Timur.

Kini, Timur bukan sekedar imaji Eropa, bukan pula “negeri impian dan ilusi”, seperti yang pernah dilontarkan Nerval dalam *Voyage I'Orient*-nya. Lebih dari itu, Timur adalah barang praktis *material* Eropa. Ia dikonstruksi, diciptakan, dan disebarkan dalam dan melalui pranata-pranata Eropa.

Membaca Said adalah membaca identitas yang retak, lalu memungutnya kembali menjadi siluet bangunan yang “utuh”. Kehidupan Said terpendar dari ujung barat Palestina hingga Amerika Serikat. Di dua dunia dengan dua kebudayaan yang berbeda inilah, kita bisa melihat sosok Said yang “terluntalunta”, sendirian, membangun sejenis hegemoni di setiap resistensi yang ia lakoni.

Buku *Orientalisme* mungkin hanyalah rekaman singkat tentang sikap Said yang begitu “keras kepala”, untuk mempertemukan – hingga akhir hayatnya – identitas-identitas yang retak itu, menempelnya kembali dalam lanskap yang baru. Meski demikian, Said mungkin tak sadar, bahwa sekuat apapun ia

mempersatukan identitas itu, masih ada sisa-sisa “retakan”, yang terkadang samar, namun sering kali rentan untuk terjatuh dan hancur kembali menjadi puing-puing yang semakin *herantakan*.

Dan, retakan-retakan itu kini bisa kita saksikan di Palestina, tanah Yerusalem dimana Said dilahirkan. Konon, di “negeri tak bertuan” ini, wujud identitas itu semakin hari, semakin kabur. Tak ada yang tahu siapa yang benar, siapa pula yang salah. Persaingan identitas kini semakin mengeras menjadi persaingan politik, militer, tanah-air, dan selanjutnya persaingan “harga diri”.

Sejak proses perdamaian Oslo hingga usaha-usaha perundingan antar-berbagai pihak baru-baru ini, Palestina seolah-olah tak pernah lepas dari puing-puing dan nestapa. Sepertinya, tak ada lagi yang perlu dinegoisasi. Kepemilikan adalah harga mati.

Jika demikian ikhwalnya, yang kita butuhkan tentu saja lebih dari sekedar dialog dan negoisasi. Kita butuh strategi “politik baru” untuk – jika memang bisa – mempersatukan identitas-identitas yang telah retak, dan membaca *Orientalisme* mungkin adalah salah satu upaya mencari strategi itu, sejenis strategi politik “pasca-identitas” yang melihat kelompok lain bukan sebagai ancaman, apalagi musuh, melainkan sebagai manusia yang berhak dihargai karena kemanusiaannya, dan bukan karena identitasnya.

Di setiap diskusi yang disajikan, terutama dalam prolog dan epilognya, Said selalu berusaha menjelaskan problem identitas-identitas tersebut. Kajian Said atas wacana orientalis Barat yang saat ini sudah mulai mengkristal menjadi sikap mengafirmasi-diri (*self affirmation*) dan mengalienasi yang lain (*alienation to other*) bisa kita baca melalui perspektif identitas ini, bahwa semakin identitas itu diperjelas batas-batasnya, semakin kecil peluang kita untuk mencapai perdamaian dan harmoni.

PENUTUP

Orientalisme, menurut Leela Gandhi (2001: 88) merupakan katalisator kolonialisme dan postkolonialisme, sebagai tahap awal postkolonialisme. Orientalisme lebih menaruh perhatian pada makna tekstual diskursif, aktivitas yang

tidak saling berhubungan sebab kapan pun dapat berbicara untuk mengklaim Timur sesuai dengan rasionalitas Barat. Oleh karena itu, Spivak menyebutkan buku Said sebagai sumber sekaligus pemicu utama timbulnya postkolonialisme. Gagasan orientalisme dikembangkan oleh Edward Said (2003: 305), bertumpu pada perspektif Foucaultian, tetapi dibungkus oleh teori hegemoni Gramscian. Masalah pokok yang dikemukakan adalah ketidakseimbangan masyarakat Barat dalam melihat masyarakat Timur.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BACAAN

- Ajip Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1976.
- Ali Sariati, *Man and Islam*, alih bahasa Dr. Amin Rais, Tugas Cendekiawan Muslim, Yogyakarta: Sholahuddin Press, 1982.
- Bambang Sugiarto (ed), *Humanisme dan Relevansinya Bagi Pendidikan*, Bandung: Jalasutra, 2008.
- Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat Bongkar Wacana atas: Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.
- Bryan S. Turner, *Teori-teori Sosiologi: Modernitas Postmodernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Christopher Norms, *The Truth About Posmodernism*, Blackwell, 1991.
- Claudine Salmon, *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Crisatopher R. Badcoch, *Levistrans, Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, alih bahasa Rabbi Habilah Abrar, Yogyakarta: Insight Reference, 2006.
- Edward W. Said, *Covering Islam*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- _____, *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*, Surabaya: Pustaka Promothia, 2003.
- _____, *Orientalisme*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Gabriel Vahanian, *The Death of Theology*, tk: tp, tt.
- H.J. Blackman, *Humanism*, Penguin Book Ltd., tk: tp, tt.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/michellfoucault>
- James Bernaie, S.I., *The Prisons of Man, an Intriduction to Foucault's, Negative Theology dalam International Philosophical Quantely*, Vol XXVII, no 100 (Desember 1987).
- K. Bertens, *Panorama Filsafat Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- _____, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Michel Foucault, *The Discourse an Language*, dalam *The Continental Philosophy*. Richard Kearny and More Rainwalter (rd), London: Redwood Book, tt.

Muzairi, Pokok-pokok Pikiran Dalam Manifesto Humanisme, *Al-Jamiah*, No 47, 1991.

Nyoman Kutha Ratna, *Postkolonialisme Indonesia, Relevansi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Richard Kearney and Mara Rainwater (ed), *The Continental Philosophy Reader*, London: The New Historicim Reader, tt.

S.T. Sunardi, *Nietzsche*, Yogyakarta: LKIS, 1996.

Shelley Walia, *Edward Said dan Penulisan Sejarah*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Sindhunata, *Delima Usaha Manusia Rasional*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

Walter Kaufmann, *Existentialism from Dostalushly to Sartre*, New York: A Meridian Book, 2005.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA